

Persepsi Ancaman dan Respons Amerika Serikat di Arktik terhadap Polar Silk Road

Made Usha M. G. Duarsa¹, Kezia Regina Setyono², Rahel Vidyarini³, Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, Made Usha M. G. Duarsa, madeusha19@gmail.com

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, Kezia Regina Setyono, keziaregina03@gmail.com

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, Rahel Vidyarini, rahelvidyarini03@gmail.com

⁴Departemen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, pakpahan@unpar.ac.id

Abstrak

Tiongkok membentuk kebijakan *Polar Silk Road* (PSR) di tahun 2018. PSR dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi positif antara Tiongkok dan negara-negara kawasan Arktik. Meskipun begitu, eksistensi PSR tetap dipandang sebagai ancaman untuk Amerika Serikat (AS) karena Tiongkok juga memiliki hubungan kooperatif dengan Rusia di kawasan Arktik. Keadaan tersebut mengakibatkan AS menghadapi dua ancaman: (1) persaingan ekonomi AS-Tiongkok; dan (2) kerja sama militer Tiongkok-Rusia. Dengan demikian, artikel ilmiah ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam terkait persepsi ancaman AS atas eksistensi PSR, bagaimana ancaman tersebut mendorong respons dan tindakan AS di Arktik, beserta implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Penggunaan kerangka teori *power transition* dipilih untuk menjelaskan respons AS terhadap PSR melalui tiga indikator: (1) ancaman dan dilema keamanan; (2) perimbangan kekuatan; serta (3) perdamaian dan perang. *Power transition* menjelaskan terkait eksistensi ancaman yang mendorong AS untuk melakukan perimbangan kekuatan melalui respons-responsnya seperti memberikan donor ekonomi dan penguatan aliansi di kawasan. Teori ini juga menekankan pentingnya tingkat perimbangan kekuatan yang diberikan AS, karena bentuk perimbangan dalam tingkat ekstrem akan menyebabkan eskalasi militer dan instabilitas kawasan. Maka dari itu, berdasarkan teori *power transition*, langkah paling strategis yang dapat diimplementasikan AS adalah dengan melakukan perimbangan kekuatan dalam tingkat rendah sehingga stabilitas Arktik tetap terjaga.

Kata kunci: *Polar Silk Road*, Arktik, Rivalitas AS-Tiongkok-Rusia, Transisi Kekuatan

Abstract

China established the Polar Silk Road (PSR) policy in 2018. The PSR aims to build positive economic developments between China and the Arctic states. Nonetheless, China's involvement in the PSR is still perceived as a strategic threat by the United States (the U.S.), due to China's cooperative relationship with Russia in the Arctic. This leaves the U.S. facing two threats: (1) US-China economic competition; (2) China-Russia military cooperation. Consequently, this article aims to conduct a comprehensive analysis of the U.S. threat perceptions regarding China's PSR, how these threats drive the U.S. responses and actions in the Arctic, along with the implications for regional stability. Power transition theory is used to explain the U.S. response to the PSR through three indicators: (1) threats and security dilemma; (2) balance of power; and (3) peace and war. Power transition explains the existence of threats that drive the U.S. to pursue a balance of power through its responses, such as providing economic aid and strengthening alliances in the region. This theory also emphasizes the importance of the U.S. maintaining a balanced power level, as an extreme form of balance may result in military escalation and regional instability. Therefore, according to power transition theory, the most strategic measure that the U.S. can implement is to maintain a low level of balance of power in order to ensure Arctic stability.

Keywords: *Polar Silk Road, Arctic, The US-China-Russia Rivalry, Power Transition*

Pendahuluan

Perubahan iklim menyebabkan sejumlah besar gletser di Arktik mencair dalam kurun waktu yang cepat. Mencairnya es Arktik memicu babak persaingan dan perselisihan baru di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung akses terhadap navigasi dan eksplorasi sumber daya menjadi semakin luas.¹ Wilayah Arktik diperkirakan mengandung 13 persen cadangan minyak dunia yang belum teridentifikasi dan 30 persen cadangan gas alam.² Perubahan iklim, persaingan militer, dan pencarian sumber daya alam mengubah wilayah Arktik menjadi sarang persaingan global. Meningkatnya sejumlah pemain penting di wilayah Arktik seperti Tiongkok dan Rusia direspon secara serius oleh Amerika Serikat (AS), mengingat bahwa kedua negara merupakan rival dalam dunia internasional. AS melalui Menteri Angkatan Lautnya, Richard Spencer menjelaskan bahwa negaranya akan meluncurkan Strategi Arktik sebagai respons dari permasalahan mencairnya es di kawasan tersebut dan permasalahan dibukanya rute perdagangan internasional baru; terlebih ancaman yang masuk akibat eksistensi *Polar Silk Road* (PSR).³

Pada tahun 2018, Tiongkok meluncurkan buku putih dengan judul *China's Arctic Policy* yang membagi kepentingan Tiongkok di Arktik ke dalam dua kategori. Pertama, di wilayah Arktik, Tiongkok terlibat secara aktif dalam kegiatan akademik seperti penelitian ilmiah, eksplorasi dan eksplorasi sumber daya, pelayaran dan keamanan. Kedua, dampak perubahan iklim di Arktik harus dijadikan perhatian utama dari para ‘aktor’ dalam permasalahan Arktik. Secara singkat, kepentingan utama Beijing adalah membawa masuk Arktik ke dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan membangun PSR.

Lagi-lagi, mencairnya gletser Arktik membuat ambisi dan tujuan Tiongkok untuk menghubungkan benua Asia (terkhusus Tiongkok) dan Eropa melalui Samudra Arktik menjadi semakin terealisasi. Menjadi bagian dalam forum Dewan Arktik, akan mempercepat realisasi kepentingan Tiongkok untuk memperluas pengaruh dan ‘menguasai’ wilayah Arktik.⁴ Lautan Arktik menghubungkan tiga benua sekaligus (Asia, Eropa, dan Amerika Utara), dan merupakan tempat terjadinya hampir 90 persen aktivitas perdagangan internasional.⁵ Pemerintah Tiongkok telah melakukan pemetaan terkait jalur, di mana jalur pelayaran akan memanfaatkan *Northern Sea Route* (NSR) yang melintasi garis pantai Rusia. Rute tersebut memiliki kemungkinan untuk memangkas waktu pelayaran sampai dengan 15 hari melalui Terusan Suez dan Selat Malaka. Hal ini juga secara strategis disusun untuk menghindari pengawasan Angkatan Laut AS di sepanjang rute tersebut.

Keputusan untuk merancang proyek PSR tidak lepas dari kenyataan bahwa saat ini Tiongkok masih sangat bergantung pada impor minyak serta gas dari Teluk Persia dan Afrika yang transit melalui jalur maritim yang diawasi oleh Angkatan Laut AS. Dengan demikian, di wilayah Arktik, Tiongkok gencar dalam melakukan investasi dan membuat kesepakatan dengan negara Arktik

¹ Nong Hong, “The melting Arctic and its impact on China’s maritime transport”, *Research in Transportation Economics* 35, no. 1 (2012): 50, <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2011.11.003>.

² Rebecca Hersman, Eric Brewer, dan Maxwell Simon, “Strategic Stability and Competition in the Arctic,” Center for Strategic and International Studies, Januari 2021, <https://www.jstor.org/stable/resrep27652>, hlm 1.

³ Sherri Goodman dan Elisabeth Freese, “China’s Ready to Cash In on a Melting Arctic,” *Foreign Policy*, 1 Mei 2018, <https://foreignpolicy.com/2018/05/01/chinas-ready-to-cash-in-on-a-melting-arctic/>.

⁴ Chih Yuan Woon, “Framing the “Polar Silk Road” (冰上丝绸之路): Critical geopolitics, Chinese scholars and the (Re)Positionings of China’s Arctic interests,” *Political Geography* 78 (2020): 8, <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102141>.

⁵ Will Bedingfield, “As the Arctic melts, China and Russia struggle for control,” WIRED, 12 November 2019, <https://www.wired.co.uk/article/arctic-ice-melting-shipping-russia-china>.

(Alaska, Kanada, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Finlandia, Rusia) demi mendapatkan pasokan minyak, gas, dan juga energi.⁶

Dalam bidang teknologi, Tiongkok juga melakukan kerja sama dengan negara-negara Arktik. Beberapa operator telekomunikasi terbesar Tiongkok seperti *China's Ministry of Industry and Information Technology* (MIIT) dan *China Telecom* melakukan kolaborasi bersama Finlandia, Rusia, Jepang, dan Norwegia dalam membangun jaringan kabel maritim yang melintasi Lingkar Arktik dengan panjang 10.500 kilometer.⁷ Investasi dan kerja sama antara Tiongkok dan negara Arktik memperlihatkan kesungguhan Tiongkok atas kelancaran PSR. Khususnya hubungan Tiongkok dengan Rusia terkait pembangunan infrastruktur Arktik Rusia, di mana salah satunya adalah NSR.⁸ Hal ini terlihat dalam ketertarikan Rusia atas investasi dan teknologi Tiongkok, dan sebagai gantinya, Rusia harus memberikan Tiongkok akses terhadap sumber daya mineral dan jalur (NSR) yang melewati garis pantai Rusia. Dengan demikian, Tiongkok dapat memperluas pengaruhnya di Arktik melalui kerja sama dengan Rusia.⁹

Dalam penulisan artikel ini, literatur dikelompokkan untuk menyoroti berbagai perdebatan dan penelitian terdahulu atas isu PSR. Kajian literatur dikelompokkan ke dalam dua, yaitu: (1) eksistensi PSR sebagai bentuk kerja sama pembangunan di negara Arktik; dan (2) eksistensi PSR mengancam pengaruh AS di Arktik. **Pertama**, PSR sebagai bentuk kerja sama pembangunan. Jika dilihat melalui perspektif Tiongkok, implementasi PSR lahir dari ide “*Silk Road on Ice*” yang kemudian menjadi dasar seluruh aktivitas kerja sama Tiongkok dengan negara-negara Arktik. Hal ini dijelaskan dalam artikel berjudul “*The Polar Silk Road: China's New Frontier of International Cooperation*,” yang menekankan bahwa motif dari ditetapkannya PSR adalah untuk menguatkan hubungan ekonomi dan infrastruktur negara di kawasan Arktik. Dengan demikian, implementasi PSR sebenarnya dimaksudkan untuk menguatkan hubungan ekonomi dan infrastruktur negara di kawasan Arktik. Pada tahun 2017 juga Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang difokuskan untuk pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) di Kutub Utara untuk menghubungkan perekonomian Tiongkok dengan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, PSR sendiri memang dibentuk dengan motif kepentingan ekonomi dan pembangunan.¹⁰

Artikel dengan judul “*Framing the “Polar Silk Road” (冰上丝绸之路): Critical geopolitics, Chinese scholars and the (Re)Positionings of China's Arctic interests,*” juga menjelaskan bagaimana aktivitas Tiongkok di Arktik merupakan bentuk kerja sama perdagangan dan infrastruktur. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah pernyataan Tiongkok dalam *China's Arctic White Paper* yang dengan jelas menunjukkan bahwa Tiongkok sangat berhati-hati dan mengikuti norma internasional ketika beraktivitas di kawasan Arktik. Tiongkok juga bertekad untuk menghormati dan mematuhi norma global seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan hukum internasional lainnya.¹¹

Upaya pengembangan penelitian riset sains di Arktik juga dilakukan Tiongkok sebagai bentuk diplomasi kolaboratif. Seperti halnya dijelaskan dalam artikel dengan judul “*China's Arctic policy on*

⁶ Freese, *Loc. Cit.*

⁷ Henry Tillman, Jian Yang, dan Egill Thor Nielsson, “The Polar Silk Road: China's New Frontier of International Cooperation,” *China Quarterly of International Strategic Studies* 04, no. 03 (Januari 2018): 349, <https://doi.org/10.1142/s2377740018500215>.

⁸ *Ibid.* 352.

⁹ Rebecca Pincus, “Three-Way Power Dynamics in the Arctic,” *Strategic Studies Quarterly* 14, no. 1 (2020): 40–63, <https://www.jstor.org/stable/26891883>.

¹⁰ Tillman, et al., *Op. Cit.*, 346-48.

¹¹ Woon, *Op. Cit.*, 104.

the basis of international law: Identification, Goals, Principles and Positions,” bahwa posisi Tiongkok terkait aktivitas penelitian di Arktik tercantum dalam dokumen *China’s White Paper*.¹² Kolaborasi ilmiah tersebut memberikan jalan bagi Tiongkok dalam fasilitas pertumbuhan serta kelancaran PSR di Arktik, termasuk mengkonsolidasikan citra dan hubungannya dengan negara-negara Arktik.¹³

Kedua, pengelompokan literatur yang berisikan argumen-argumen bersifat kontradiktif, dan menyatakan bahwa eksistensi PSR tetap memberikan ancaman terhadap AS. Argumen ini terlihat dengan jelas dalam artikel “*China’s Polar Silk Road: Opportunities and Challenges for Nordic Arctic*,” yang menyatakan bahwa terdapat pergeseran kepentingan Tiongkok melalui PSR.¹⁴ Artinya, motif utama PSR yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan kerja sama kolektif kemudian menjadi mengarah kepada pencapaian kepentingan nasional Tiongkok dan aliansinya, Rusia. Pengembangan NSR bersama Rusia dipercaya dapat mendukung pembangunan infrastruktur PSR yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendorong kerja sama perdagangan dan investasi antara Tiongkok-Rusia dengan negara kawasan Arktik. Mengingat Arktik juga menjadi kawasan strategis Rusia untuk perdagangan dan memperoleh energi, maka masuknya PSR di Arktik akan turut membawa Rusia sebagai ancaman baru AS.¹⁵

Hal ini juga didukung oleh argumen dalam artikel dengan judul “*China’s BRI on the Polar Silk Road: Evolving Labor Agenda in the Arctic*” yang menekankan bagaimana proyek BRI Tiongkok merupakan bentuk intervensi kedaulatan negara penerima. Ketika proyek PSR berlangsung, Tiongkok akan memasuki wilayah berdaulat serta turut membawa masuk tenaga kerja sendiri untuk bekerja pada proyek-proyek tersebut. Keadaan ini kemudian memberikan peluang bagi Tiongkok untuk memiliki kontrol dan kewenangan luas dalam menjalankan aktivitas PSR di Arktik.¹⁶

Pemaparan artikel-artikel di atas lebih menjelaskan terkait apakah PSR memberikan ancaman terhadap pengaruh AS di Arktik atau tidak. Terlebih lagi, pembahasan literatur terkait bagaimana PSR mengancam AS juga masih berfokus pada persaingan ekonomi—termasuk perdagangan, infrastruktur, dan energi—serta perluasan pengaruh Tiongkok. Maka dari itu, melalui artikel ini, penulis berusaha untuk menunjukkan bentuk ancaman tambahan yang belum diperlihatkan dalam artikel-artikel sebelumnya dan menjelaskan rasionalitas respons AS terhadap ancaman tersebut berserta implikasinya terhadap stabilitas Arktik menggunakan kerangka teori *power transition*.

AS tidak bisa merasa aman ketika pengaruh Tiongkok dalam PSR mulai memasuki wilayah Arktik. Keberadaan PSR juga mendekatkan dua rival terbesar AS, yaitu Tiongkok dan Rusia, karena peluang kerja sama antarkedua negara menjadi semakin luas. Pernyataan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan penelitian “**Bagaimana persepsi ancaman dan respons Amerika Serikat di Arktik terhadap Polar Silk Road?**”. Kerangka teori *power transition* digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas melalui tiga indikator, yaitu: (1) ancaman dan dilema keamanan; (2) perimbangan kekuatan; dan (3) perdamaian dan perang.

¹² MA Xinmin, “China’s Arctic Policy on the Basis of International Law: Identification, Goals, Principles and Positions,” *Marine Policy* 100 (February 2019): 271, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.027>.

¹³ Anu Sharma, “China’s Polar Silk Road: Implications for the Arctic Region,” *Air University (AU)*, 25 Oktober 2021, <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2820750/chinas-polar-silk-road-implications-for-the-arctic-region/>.

¹⁴ Mustafa TÜTER, “China’s Polar Silk Road: Opportunities and Challenges for Nordic Arctic,” *International Journal of Politics and Security* 04, no. 03 (10 September 2022): 299-305, <https://doi.org/10.53451/ijps.1152777>.

¹⁵ Ibid, 306-307.

¹⁶ Ronald Brown, “China’s BRI on the Polar Silk Road: Evolving Labor Agenda in the Arctic,” *Canada-United States Law Journal* 46, no. 1 (1 Januari 2022): 138–165, <https://scholarlycommons.law.case.edu/cuslj/vol46/iss1/13>.

Kerangka Teori

Power transition merupakan teori yang dikemukakan oleh A. F. K. Organski pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Organski, Kugler, Lemke, dan para sarjana lainnya. Menurut Organski, tatanan internasional merupakan sistem yang bersifat hierarkis dengan tingkat kerja sama dan persaingan yang berbeda-beda antarnegara. Proses ini dapat menyebabkan pergeseran kekuatan dominan yang menempati posisi teratas dalam tatanan internasional.¹⁷ *Power transition* ditentukan oleh hierarki, kekuatan, tingkat kepuasan dan *status quo*, serta menghubungkan perubahan politik global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan politik yang berbeda-beda antarnegara. Teori *power transition* memiliki tiga indikator untuk menjelaskan proses pergeseran kekuatan: (1) ancaman dan *security dilemma*; (2) *balance of power*; dan (3) perdamaian dan perang.

Pertama, ancaman dan *security dilemma* (dilema keamanan). Tatanan internasional menciptakan suatu hierarki di mana negara dominan berada di tingkatan atas. Kekuatan suatu negara dapat diukur melalui populasi dan wilayah, sumber daya, kapasitas ekonomi dan militer, serta stabilitas politiknya. Kekuatan negara bersifat relatif terhadap kekuatan negara lainnya. Menurut pandangan kaum realis, ancaman merupakan akibat dari adanya asimetri kekuatan. Dalam jangka pendek, ancaman dapat berupa keseimbangan kekuatan militer. Sementara untuk jangka panjang, ancaman dapat berupa keuntungan ekonomi atau teritorial yang diperoleh negara pesaing.¹⁸

Kaum realis berpendapat bahwa dunia internasional yang anarkis menyebabkan setiap negara hanya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri. Maka, negara akan berusaha untuk memaksimalkan keamanannya. Dilema keamanan muncul akibat ketidaktahuan negara akan motif di balik tindakan peningkatan keamanan negara lain di sekitarnya. Negara akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer demi menjaga keseimbangan kekuatan atau bahkan melakukan serangan terlebih dahulu untuk mencegah ketidakseimbangan kekuatan yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menciptakan konflik dan mendorong negara-negara untuk terlibat dalam perlombaan senjata. Aktor-aktor negara berjuang untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, namun berakhir dengan konflik militer.¹⁹

Kedua, *balance of power* (keseimbangan kekuatan). Negara dapat melakukan penyeimbangan kekuatan untuk menghindari ancaman. Keseimbangan kekuatan adalah perilaku negara atau sekelompok negara untuk melindungi diri dari negara atau kelompok negara lain dengan cara menyesuaikan kekuatan melalui dua cara, yakni dengan meningkatkan kemampuan melalui upaya internal berupa penguatan diri atau melalui upaya eksternal berupa penyelarasan dengan negara lain dan menambah kekuatan melalui aliansi.²⁰

Teori *power transition* berfokus pada tingkat pertumbuhan kekuatan antarnegara yang berbeda, di mana terdapat negara yang memperoleh kekuatan, kehilangan kekuatan, atau tidak mengalami keduanya. Konsep keseimbangan kekuatan kaum realis pada umumnya memiliki asumsi bahwa kekuatan setiap negara relatif konstan, kecuali jika negara tersebut memenangkan perang atau membuat aliansi baru. Namun, teori *power transition* berpendapat bahwa perubahan internal akibat industrialisasi dan modernisasi politik dapat meningkatkan kekuatan nasional suatu negara. Industrialisasi tiap negara yang tidak berjalan serentak dan merata menyebabkan terjadinya transisi kekuatan. Hal ini disebabkan oleh negara yang mengalami lonjakan kekuatan secara tiba-tiba (akibat

¹⁷ A. F. K. Organski, *World Politics* (New York: Knopf, 1968).

¹⁸ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Boston: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

industrialisasi). Maka dari itu, negara yang berhasil meningkatkan kekuatan melalui industrialisasi mulai mencari posisi yang lebih tinggi dalam tatanan internasional.²¹

Ketiga, perdamaian dan perang. Salah satu akibat dari tingkat pertumbuhan kekuatan negara yang berbeda adalah potensi konflik untuk mencapai tahap keseimbangan kekuatan. Dalam konteks keseimbangan kekuatan, teori *power transition* memiliki pandangan yang berbeda dengan teori realisme pada umumnya yang berpendapat bahwa keseimbangan kekuatan akan menciptakan perdamaian. Sebaliknya, teori ini berargumen bahwa keberadaan kekuatan dominan akan menciptakan stabilitas yang mencegah terjadinya perang dan keberadaan negara yang berusaha meningkatkan kekuatannya dapat mendorong terjadinya perang.

“A large power discrepancy between the dominant nation and the rest of the nations below it ensures the security of the leader and the stability of the order as a whole.” (Organski 1968, 365).

“Peace, then, is most likely to be maintained when the powerful and satisfied nations together with their allies enjoy a huge preponderance in power over the challenger and its allies, that is, when the power of those who support the status quo is so great that no military challenge to them could hope to achieve success. War is most likely when the power of the dissatisfied challenger and its allies begins to approximate the power of those who support the status quo.” (Organski 1968, 370).

Walau begitu, ketika terdapat negara besar yang telah berkembang dan mengalami industrialisasi mencoba menantang negara dominan yang ukurannya setara atau lebih kecil, maka peluang terjadinya konflik juga akan berkurang. Pihak yang menantang, tidak perlu menyerang negara dominan secara terbuka karena dapat mengungguli negara tersebut melalui pertumbuhan internal. Sementara itu, negara yang dominan akan menyadari bahwa mereka berpotensi untuk kalah dalam persaingan sehingga mereka mempunyai motif yang kuat untuk menghindari dampak perang dan melakukan penyesuaian secara damai.²²

Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif memiliki fokus multi-metode. Artinya, penelitian kualitatif mampu memperlihatkan fenomena secara komprehensif dan menyeluruh sehingga penulis dapat memahami isu secara lebih mendalam dan luas. Denzin dan Lincoln turut menjelaskan bahwa penelitian akan melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjeknya. Keadaan tersebut mengakibatkan penelitian kualitatif mampu mencakup berbagai hal secara holistik.²³ Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen sekunder (dokumen resmi/report/artikel jurnal). Menurut Hamed Taherdoost, dokumen sekunder didefinisikan sebagai data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh peneliti terdahulu. Data

²¹ Organski, *Op. Cit.*, 339-344.

²² Ibid, 372.

²³ Patrik Aspers & Ugo Corte, “What is Qualitative in Qualitative Research,” *Qual Sociol* 42, (2019): 142, <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>.

sekunder dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi sebagai dasar merancang sebuah penelitian.²⁴

Analisis

a. Hubungan Tiongkok-Rusia: Proyek PSR dan Kerja Sama Militer di Arktik

Hubungan Tiongkok-Rusia di Arktik berfokus pada dua sektor, yaitu ekonomi dan militer. Rusia melihat Tiongkok sebagai mitra non-Barat yang ideal untuk mengembangkan rencananya di wilayah Arktik. Tiongkok juga dilihat sebagai peluang untuk mewujudkan upaya *balance of power* mengingat posisi Rusia yang saat ini sedang mengalami penangguhan oleh berbagai negara Barat dan tujuh negara Arktik akibat invasinya di Ukraina. Di sisi lain, Tiongkok melihat Rusia sebagai pembawa keuntungan di bidang ekonomi, keamanan energi, dan pengaruh politik di Arktik.²⁵

Pertama, kerja sama ekonomi. Proyek PSR merupakan hasil dari pengembangan konsep “*Silk Road on Ice*,” yang pertama kali diusulkan oleh Menteri Manajemen Darurat Rusia, Sergey Shoygu pada tahun 2011. Seiring waktu, Rusia berupaya menjalin kerja sama untuk memanfaatkan cadangan energi yang melimpah di Arktik sekaligus penggunaan NSR sebagai jalur pelayaran komersial strategis. Dalam upaya memperluas ekspor energi ke Asia Timur, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, Rusia meningkatkan investasi dalam proyek infrastruktur di Arktik untuk membangun konektivitas antara Eropa dan Asia.²⁶ Upaya Rusia tersebut selaras dengan keinginan Tiongkok untuk memperluas jaringan perdagangan internasional melalui PSR. Terlebih, kerja sama ekonomi Tiongkok-Rusia menjadi semakin erat setelah penangguhan yang dijatuhkan terhadap Rusia telah menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama negaranya.²⁷

Kerja sama ekonomi Tiongkok-Rusia, terutama dalam PSR, berpusat pada sektor energi yang terlihat dalam kemitraan perusahaan Rusia, Gazprom, dengan perusahaan Tiongkok, *China National Petroleum Corporation* (CNPC). Kedua pihak telah menandatangani kontrak yang wajibkan Gazprom untuk memasok 38 miliar meter kubik gas setiap tahunnya untuk Tiongkok selama 30 tahun.²⁸ Selain itu, perusahaan Rusia Novatek juga menjalin proyek kerja sama dengan CNPC di Yamal sejak 2013, di mana Tiongkok menanam investasi lebih dari \$13 miliar dan terus meningkatkan kepemilikannya hingga 30 persen dalam proyek ini.²⁹

Melalui kerja sama ini, Rusia mampu menggantikan pinjaman yang diberikan oleh negara Barat dan menemukan akses alternatif terhadap teknologi. Sementara itu, Tiongkok memiliki akses yang lebih cepat dan murah terhadap *Liquefied Natural Gas* (LNG) di Arktik sehingga memungkinkan Tiongkok untuk melakukan diversifikasi impor energinya. Tiongkok juga secara tidak langsung meningkatkan pengaruhnya di Arktik sebagai produsen peralatan produksi minyak dan gas di masa mendatang.

²⁴ Hamed Taherdoost, “Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects,” *International Journal of Academic Research in Management* 10, no. 1 (2021): 12, <https://hal.science/hal-03741847/document>.

²⁵ Chuan Chen, “China-Russia Arctic Cooperation in the Context of a Divided Arctic,” The Arctic Institute - Center for Circumpolar Security Studies, April 2023, <https://www.thearcticinstitute.org/china-russia-arctic-cooperation-context-divided-arctic/>.

²⁶ Henry Tillman, Jian Yang, dan Egill Thor Nielsson, 347.

²⁷ Alexandra Prokopenko, “What Are the Limits to Russia’s “Yuanization”?” Carnegie Politika, 27 Mei 2024, <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/05/china-russia-yuan?lang=en>.

²⁸ Pincus, *Loc. Cit.*

²⁹ Jim Townsend dan Andrea Kendall-Taylor, “Partners, Competitors, or a Little of Both?: Russia and China in the Arctic,” JSTOR (Center for a New American Security, 1 Maret 2021), <https://www.jstor.org/stable/resrep30199.6>.

Menurut Reuters, perdagangan dua arah Tiongkok dengan Rusia pada tahun 2023 mencapai titik tertingginya yakni sebesar \$240 miliar.³⁰ Angka perdagangan ekonomi terus mengalami peningkatan sejak Rusia menjalankan invasi ke Ukraina. Selain kerja sama ekonomi dalam ekstraksi energi, Rusia juga bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengembangkan NSR. Melalui PSR, Tiongkok dan Rusia membangun berbagai infrastruktur, seperti pelabuhan di Zarubino, pelabuhan laut dalam di Arkhangelsk, dan proyek Kereta Api Belkomur untuk menghubungkan rel Siberia ke Arkhangelsk.³¹

Kedua, kerja sama militer. Kedekatan Tiongkok-Rusia dalam bidang ekonomi turut mendorong penguatan hubungan kooperatif kedua negara di bidang militer. Tiongkok dan Rusia juga menjalin kerja sama di bidang keamanan dengan melakukan berbagai penelitian dan latihan militer bersama. Inisiatif penelitian bersama dimulai pada tahun 2016 dan didukung dengan pembukaan pusat penelitian bersama guna memperkirakan kondisi es di sepanjang NSR dan menginformasikan upaya pembangunan ekonomi di masa depan pada tahun 2019. Selama beberapa tahun belakangan, Tiongkok mengadakan latihan militer dengan Rusia di Laut Barents dan Laut Utara, serta bergabung dalam latihan Vostok pada tahun 2018 yang mencakup latihan skala besar di seluruh Siberia Timur.³² Jika kedekatan militer terus meningkat, keamanan negara Barat akan terancam dengan adanya militerisasi Arktik yang memicu perlombaan senjata dengan kekuatan besar lainnya di wilayah tersebut seperti NATO.³³

b. Eksistensi PSR Tiongkok Menggeser Dinamika Kekuatan AS di Kawasan

Eksistensi PSR merupakan indikator pertama dalam penjelasan teori *power transition*. Teori ini akan menjelaskan bahwa awal mula terjadinya transisi kekuatan dalam *status quo* kawasan Arktik adalah eksistensi PSR milik Tiongkok. Secara historis, AS memperoleh kedaulatan territorial atas wilayah Arktik Alaska dari Rusia pada tahun 1867. Bagi AS, Alaska memiliki sumber daya alam melimpah dengan potensi untuk menjamin ketersediaan pasokan perdagangan yang memadai.³⁴ Meskipun begitu, territorial AS di Lingkar Arktik sebenarnya hanya sebesar 15 persen. Jika dibandingkan dengan territorial Arktik Rusia, luas territorial Arktik AS tergolong kecil mengingat Rusia memiliki sebesar 45 persen wilayah dalam Lingkar Artik.³⁵

Sebelum Tiongkok membawa kebijakan PSR ke Arktik, fokus ancaman AS di kawasan adalah militerisasi Rusia.³⁶ Namun, ketika Tiongkok dan Rusia mulai membahas proyek PSR dan pemanfaatan jalur NSR, posisi AS di kawasan mulai mengalami pergeseran dan AS memiliki ancaman baru, yaitu PSR Tiongkok. Banyaknya aktivitas pembangunan proyek PSR antara Tiongkok dengan negara-negara Arktik menyebabkan pengaruh AS tergeser. Terlebih lagi, Tiongkok juga

³⁰ “China-Russia 2023 Trade Value Hits Record High of \$240 Bln - Chinese Customs,” Reuters, 12 Januari 2024, <https://www.reuters.com/markets/china-russia-2023-trade-value-hits-record-high-240-bln-chinese-customs-2024-01-12/>.

³¹ Townsend dan Kendall-Taylor, *Loc. Cit.*

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Annika E. Nilsson, “The United States and the Making of an Arctic Nation,” *Polar Record* 54, no. 2 (Maret 2018): 96-97, <https://doi.org/10.1017/s0032247418000219>.

³⁵ Michael Paul, “U.S. Arctic Security Policy - North American Arctic Strategies, Russian Hubris and Chinese Ambitions,” *Stiftung Wissenschaft Und Politik (SWP Comment)* 40 (Juli 2023): 1, <https://doi.org/10.18449/2023C40>.

³⁶ Nicole Franiok, “Russian Arctic Military Bases,” American Security Project, 22 April 2020, <https://www.americansecurityproject.org/russian-arctic-military-bases/>.

diberikan status sebagai *permanent observer* dalam *Arctic Council* pada 2013.³⁷ Hal ini kemudian menandakan peningkatan kekuatan Tiongkok di Arktik, dan tergesernya kekuatan AS di Arktik.

c. Persepsi Ancaman dan Dilema Keamanan AS atas Eksistensi PSR Tiongkok

Setelah kekuatan AS di Arktik mulai bergeser, teori *power transition* berargumen bahwa AS akan memiliki persepsi ancaman dan dilema keamanan. Persepsi ancaman dan dilema keamanan AS atas kemunculan PSR Tiongkok terlihat dalam dua indikator: (1) peningkatan persaingan ekonomi AS-Tiongkok di Arktik; dan (2) pengaruh kerja sama militer Tiongkok-Rusia di Arktik.

Pertama, persepsi ancaman dan dilema keamanan AS dalam konteks ekonomi. Kepentingan proyek PSR bagi Tiongkok adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi dengan dunia, termasuk kawasan Arktik. Maka dari itu, dengan sangat jelas, melalui PSR, Tiongkok sedang mencoba untuk mencari zona geo-ekonomi baru yang mampu memperluas perdagangan lintas batas.³⁸ Di sisi lain, kepentingan Rusia di kawasan Arktik salah satunya adalah mengembangkan potensi komersial dari pasokan energi, alasan ini merupakan dasar mengapa Arktik menjadi kawasan strategis bagi Rusia. Kerja sama Tiongkok-Rusia di Arktik tersebut dapat memudahkan Rusia untuk melakukan kegiatan ekspor-impor sumber energi melalui jalur NSR.³⁹

Tiongkok memandang Rusia sebagai mitra strategis yang krusial dalam pembangunan PSR. Rusia juga merupakan negara yang mengajukan gagasan *Silk Road on Ice* pada tahun 2011 untuk mengembangkan jalur perdagangan Tiongkok dalam PSR di Arktik.⁴⁰ Bahkan, sebelum kemunculan PSR, sudah banyak akademisi Tiongkok yang memberikan usulan agar negaranya dapat secara aktif menguatkan aktivitas perdagangan di Arktik dan mengembangkan infrastruktur transportasi serta energi.⁴¹ Aktivitas ekonomi Tiongkok di Arktik menjadi instrumen negara untuk mendapatkan klaim dan legitimasi atas intervensi keamanan Tiongkok di Arktik. Maka dari itu, PSR dilihat sebagai instrumen geo-ekonomi dan strategi komprehensif Tiongkok di Arktik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan proyek BRI di mana objektif utamanya adalah untuk menghasilkan pengaruh politik dan bukan untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Perusahaan Tiongkok juga semakin mendominasi Arktik. Sebanyak 48 perusahaan di tahun 2020 tercatat mulai beroperasi di Arktik, dan meningkat menjadi 123 perusahaan di tahun 2023. Jumlah perusahaan terus bertambah dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun, dengan total 359 perusahaan Tiongkok yang terdaftar beroperasi di Arktik.⁴² Dalam konteks ini, perusahaan milik negara (Tiongkok) diperintahkan untuk mengembangkan proyek-proyek Arktik dalam jangka panjang tetapi tidak terlalu menguntungkan negara mitra di Arktik; sehingga Tiongkok dapat menjadi pemain

³⁷ Matilde Biagioli, “China’s Push-in Strategy in the Arctic and Its Impact on Regional Governance,” *IAI Commentaries* 23, no. 41 (September 2023):2-3, <https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2341.pdf>.

³⁸ Yu N Gladkiy et al., “‘Polar Silk Road’: Project Implementation and Geo-Economic Interests of Russia and China,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 434, no. 1 (1 Januari 2020): 1–8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/434/1/012009>.

³⁹ Yu Cao, “Implications for Sino-Russian Cooperation on the Polar Silk Road,” *Arctic Yearbook 2022*, diakses tanggal 12 February 2024, hlm 2,

<https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2022/2022-scholarly-papers/425-implications-for-sino-russian-cooperation-on-the-polar-silk-road>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Matti Puranen and Sanna Kopra, “China’s Arctic Strategy – a Comprehensive Approach in Times of Great Power Rivalry,” *Scandinavian Journal of Military Studies* 6, no. 1 (January 1, 2023): 245, <https://doi.org/10.31374/sjms.196>.

⁴² Chou, Brenda. “Implications of Russia and China’s Developing Arctic Partnership.” American Security Project, 25 Juni 2024. <https://www.americansecurityproject.org/implications-of-russia-and-chinas-developing-arctic-partnership/>.

utama di kawasan Arktik melalui aktivitas ekonominya.⁴³ Keadaan ini kemudian mengakibatkan eksistensi Tiongkok di Arktik mendorong rivalitas AS-Tiongkok dalam konteks ekonomi.

Kawasan Arktik berhasil menjadi arena baru bagi Tiongkok untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh ekonominya. Ketika wilayah Arktik secara resmi telah menjadi bagian dari PSR, kecemasan AS mengarah pada formulasi regulasi kebijakan baru yang mendapatkan pengaruh dari Tiongkok. Artinya, Tiongkok akan terlibat aktif atas pembentukan aturan dan kebijakan dalam kerja sama BRI di mana kerangka PSR akan memengaruhi regulasi pembangunan infrastruktur, keuangan, dan energi di negara-negara Arktik.⁴⁴

Dominasi perusahaan asal Tiongkok di Arktik juga meningkatkan nilai ekonomi nasional Tiongkok dan menghalangi peluang bagi AS untuk mengembangkan kegiatan ekonominya di kawasan tersebut. Melalui pengembangan PSR bersama Rusia, Tiongkok menambah poin untuk semakin unggul dalam persaingan ekonomi dengan AS. Selain itu, perdagangan energi Tiongkok-Rusia mampu menjadikan Tiongkok sebagai uluran tangan yang membantu usaha Rusia untuk bertahan hidup dari hambatan dan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS dan negara Eropa lainnya. Jalinan kedekatan ekonomi Tiongkok-Rusia inilah yang menjadi ancaman baru bagi AS, mengingat kedua negara tersebut merupakan rival terbesar AS dalam tatanan global.

Kedua, persepsi ancaman dan dilema keamanan AS dalam konteks militer. Arktik merupakan kawasan strategis AS, hal ini dapat dilihat dalam dokumen *The US Arctic Strategy* pada tahun 2013. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa dalam kawasan Arktik, AS berfokus pada tiga pilar: (1) memajukan kepentingan keamanan AS; (2) mengejar tanggung jawab pengelolaan wilayah Arktik; (3) memperkuat kerja sama internasional.⁴⁵ Implementasi ketiga pilar tersebut memerlukan seluruh instrumen kekuatan nasional AS. Maka, AS merasa sangat terancam ketika Tiongkok mulai beraktivitas kawasan Arktik bersamaan dengan Rusia.

Dilema keamanan AS terhadap hubungan kooperatif Tiongkok-Rusia di Arktik berkaitan dengan perilaku agresif Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022. Melihat hal tersebut, AS memandang Rusia sebagai aktor yang mendisrupsi stabilitas internasional.⁴⁶ Dalam hal ini, Rusia akan menggunakan kawasan Arktik sebagai basis akumulasi kekuatan yang memiliki potensi untuk diluncurkan ke Samudera Atlantik Utara melalui jalur *Greenland-Iceland-UK* (GIUK).⁴⁷ Konflik NATO-Rusia juga kemungkinan akan mengalami eskalasi perang mengingat Rusia dapat mengambil langkah agresif untuk melakukan serangan ke Norwegia atau Finlandia mengingat lokasinya strategis dari markas militernya di Arktik.⁴⁸

Jika melihat dampak dari Perang Rusia-Ukraina, salah satunya adalah diberikannya status keanggotaan NATO kepada Swedia dan Finlandia, sehingga menjadikan Rusia sebagai satu-satunya negara Arktik yang bukan merupakan keanggotaan NATO. Keadaan ini kemudian membuat Rusia menjadi lebih merangkul Tiongkok sebagai aliansinya demi mempertahankan pengaruh negaranya di Laut Arktik. Dengan demikian, AS semakin mengalami dilema keamanan.

⁴³ Ibid, 246.

⁴⁴ TÜTER, *Op. Cit.*, 305.

⁴⁵ Jorge A. Rosario, “U.S. ARMY ARCTIC DOMINANCE: A LONG WAY AWAY” (Alabama, US: Maxwell Air Force Base: Air War College, 7 Februari 2022, https://aul.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=01AUL_INST:AUL&docid=alma995924254906836.

⁴⁶ Colin Wall dan Njord Wegge, “The Russian Arctic Threat: Consequences of the Ukraine War,” www.csis.org, 25 Januari 2023, <https://www.csis.org/analysis/russian-arctic-threat-consequences-ukraine-war>.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Dilema keamanan AS terlihat jelas dalam pernyataan Wakil Menteri Pertahanan AS, Kathleen Hicks. Hicks mengatakan bahwa aktivitas Tiongkok di Arktik semakin mengalami peningkatan mulai dari pengoperasian tiga kapal pemecah es hingga penghadiran militer di kawasan bersama Rusia. Di samping fakta bahwa Tiongkok tidak memiliki kedaulatan di Arktik, Tiongkok tetap terlihat terus memperjuangkan perluasan pengaruh yang lebih besar di kawasan. Hicks juga menyampaikan kekhawatiran AS atas Tiongkok sebagai *strategic competitor* yang selalu memiliki kehendak untuk merombak *status quo* tatanan internasional.⁴⁹ Teori *power transition* menjelaskan keadaan di atas dengan argumen bahwa ketika aktor negara, yaitu AS, tidak memiliki kepastian atas motif hubungan Tiongkok-Rusia di Arktik, maka AS akan berusaha untuk menciptakan stabilitas melalui perimbangan kekuatan. Dengan demikian, teori *power transition* menjelaskan respons-respons yang dilakukan AS sebagai bentuk implementasi keseimbangan kekuatan.

d. Respons Amerika Serikat terhadap PSR sebagai Bentuk Keseimbangan Kekuatan

Teori *power transition* berargumen bahwa negara yang terancam (dalam konteks ini AS) akan melakukan perimbangan kekuatan. AS telah melakukan beberapa hal sebagai respons ancaman PSR di Arktik. **Pertama**, dalam konteks ekonomi, AS memperpanjang donor ekonomi kepada Greenland untuk melawan pengaruh Tiongkok. Mengingat Greenland sendiri memiliki penghuni yang sedikit, maka negaranya sangat bergantung pada dana hibah tahunan yang diterima dari Denmark.⁵⁰ Maka dari itu, AS melihat keadaan tersebut sebagai peluang di mana negaranya kemudian memutuskan untuk memperpanjang donor ekonomi untuk Greenland sebagai bentuk penguatan aliansi kawasan. Sanksi ekonomi AS terhadap Rusia di awal tahun 2022 juga menyebabkan prospek pengembangan Rusia di Arktik semakin terganggu. Embargo bertahap atas pembelian minyak dan gas Rusia masih berlaku, sehingga mendorong kemungkinan mitra dagang potensial Rusia menolak penggunaan NSR sebagai rute perdagangan.⁵¹ Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana pengaruh Tiongkok di kawasan akan menjadi semakin meningkat ketika perekonomian Rusia dilemahkan.

Kedua, dalam konteks militerisasi Rusia, AS juga berupaya untuk merespons setenang mungkin. Melihat perilaku agresif Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022, AS memahami bahwa Rusia berpotensi melakukan eskalasi militer dengan alasan “terancam”. Maka dari itu, AS menggunakan strategi bertahap untuk meningkatkan militer defensifnya di Arktik sehingga lebih terkendali. Para pemangku kebijakan di Kementerian Pertahanan AS juga mengatakan bahwa AS tidak berupaya untuk melakukan perlombaan militer di Arktik. Artinya, AS harus bisa untuk menahan diri dalam memperluas kekuatan militer di Arktik agar tidak mendorong Rusia untuk meningkatkan eskalasi militer.⁵²

⁴⁹ Todd Lopez, C. “New DOD Strategy Calls for Enhancements, Engagements, Exercises in Arctic.” U.S. Department of Defense, 22 Juli 2024. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3846323/new-dod-strategy-calls-for-enhancements-engagements-in-arctic/>.

⁵⁰ Jacob Gronholt-Pedersen dan Humeyra Pamuk, “U.S. Extends Economic Aid to Greenland to Counter China, Russia in Arctic,” Reuters, 23 April 2020, <https://www.reuters.com/article/uk-usa-trump-greenland-idUKKCN225202/>.

⁵¹ Brian Bonner, “Russia’s Arctic Economy Is Heading for Decline,” GIS Reports, 21 Oktober 2022, <https://www.gisreportsonline.com/r/russia-arctic-economy/>.

⁵² Ryan Burke dan Jahara Franky Matisek, “The Polar Trap China, Russia, and American Power in the Arctic and Antarctica,” JOURNAL of INDO-PACIFIC AFFAIRS, no. Special Issue (Oktober 2021): 36–66, <https://media.defense.gov/2021/Oct/24/2002879323/-1/-1/JIPA%20-%20BURKE%20&%20MATISEK.PDF>.

U.S. Department of Defense juga mengeluarkan dokumen *2024 Security Strategy* yang dikhususkan untuk kawasan Arktik. Salah satu upaya yang dilakukan AS berdasarkan dokumen tersebut adalah menjalin dan memperkuat aliansi dengan negara-negara Arktik.⁵³

“Allies and partners form a center of gravity as part of integrated deterrence, and they are at the core of DoD’s strategy for the Arctic as well. The region boasts a notable concentration of highly capable Allies and partners with whom the United States already shares a high degree of cooperation and aligned interests, values, and objectives. We share North American aerospace warning, aerospace control, and maritime warning responsibilities with Canada via NORAD, the world’s most enduring binational command. In the European Arctic, the Joint Force works by, with, and through our Allies to deter aggression in the region. In addition to relationships with Allied and partner militaries, regular engagement and government-to-government consultations with Alaska Native tribes, communities, and corporations are critical to achieving shared objectives. Many of our Allies and partners live every day in the Arctic operational environment and can bring significant capabilities and expertise to bear.” (U.S. Department of Defense, 2024 Security Strategy, 11)

“In addition to the important work alongside Allies and partners, DoD will remain ready to cooperate in the Arctic with any state or key stakeholder that shares our interests and is willing to work constructively to address shared challenges such as PR/SAR.” (U.S. Department of Defense, 2024 Security Strategy, 11)

Respons defensif AS atas kedua ancaman (sektor ekonomi dan militer) bersifat spesifik dan *direct* melawan satu negara. Seperti upaya melemahkan perekonomian Rusia melalui embargo, hal ini justru melahirkan ancaman baru untuk AS, karena pengaruh Tiongkok di Arktik menjadi meningkat ketika kekuatan Rusia berhasil dilemahkan. Dengan demikian, sebenarnya akan sulit bagi AS untuk melawan kedua negara mengancam (Tiongkok dan Rusia) secara *direct* dan satu persatu.⁵⁴ Jika dijelaskan dalam perspektif *power transition*, argumennya akan mengarah kepada posisi AS sebagai negara dominan yang menyadari bahwa potensi kekuatannya lebih kecil dibandingkan potensi kekuatan negara pesaing, yaitu Tiongkok. *Power transition* menjelaskan bahwa AS akan menghindari dampak eskalasi konflik dan sebagai gantinya, melakukan penyesuaian secara damai.

Dengan demikian, menurut perspektif *power transition*, langkah paling strategis yang dapat AS implementasikan adalah dengan tidak melakukan perimbangan kekuatan secara ekstrem. Hal ini menjadi indikator terakhir dalam teori *power transition* mengenai perdamaian dan perang. Berdasarkan teori tersebut, ketika AS menyadari bahwa kekuatannya di Arktik tidak cukup besar untuk melawan eksistensi Tiongkok sebagai *emerging state*, maka AS tidak akan melakukan perlawanan ekstrem sebagai bentuk perimbangan kekuatan, sehingga yang terjadi di Arktik adalah tidak perang (perdamaian), dan transisi kekuatan terjadi.⁵⁵ Seandainya AS melakukan perimbangan

⁵³ “2024 Security Strategy,” U.S. Department of Defense, <https://media.defense.gov/2024/Jul/22/2003507411/-1/-1/0/DOD-ARCTIC-STRATEGY-2024.PDF>.

⁵⁴ Pincus, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Organski, *Loc. Cit.*

kekuatan dalam konteks ekstrem seperti meningkatkan militer dan embargo, *power transition* menjelaskan bahwa yang justru akan terjadi adalah instabilitas atau perang, dan transisi kekuatan tidak terjadi.

e. ***In Essence: Teori Power Transition dalam Menjelaskan Perilaku AS di Kawasan Arktik***

Melihat respons AS untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingannya di Arktik, kerangka teori *power transition* dapat menjelaskan motif dari tindakan AS tersebut. *Power transition* sendiri diartikan sebagai transisi kekuatan dalam sistem internasional ketika terdapat negara yang bertindak menantang posisi negara hegemon di *status quo*.⁵⁶ Dalam konteks ini, Tiongkok dipandang telah menantang posisi kekuatan AS, khususnya di kawasan Arktik melalui PSR.

Organski mendefinisikan *power transition* sebagai keadaan internasional (*status quo*) yang stabil (konstan). Ketika satu negara berhasil berkembang pesat, negara tersebut akan memungkinkan untuk mengimbangi kekuatan negara dominan di lanskap internasional.⁵⁷ Dalam situasi ini, Tiongkok merupakan negara yang berkembang pesat di kawasan Arktik, dan AS sebagai negara hegemon. *Power transition* menjelaskan bahwa peningkatan pengaruh Tiongkok di Arktik menyebabkan AS mengalami dilema keamanan akibat eksistensi PSR milik Tiongkok. Implementasi PSR di Arktik memegang tujuannya pada pemenuhan kepentingan nasional Tiongkok yang dilapisi oleh upaya pengembangan kerja sama kolektif. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi negara yang memiliki kontrol atas rute-rute perdagangan di Arktik melalui PSR, seperti pengembangan jalur perdagangan NSR. Dengan demikian, Tiongkok menggunakan PSR sebagai instrumen untuk mewujudkan efektivitas perdagangan internasional mengingat rute laut Arktik lebih hemat biaya.⁵⁸

Dilema keamanan yang dialami AS terhadap kekuatan PSR Tiongkok kemudian mendorong AS untuk melakukan apa yang disebut sebagai *balance of power* (perimbangan kekuatan). Keadaan ini merupakan apa yang teori *power transition* maksud bahwa perimbangan kekuatan akan dilakukan ketika terdapat *emerging state* yang membuat pengaruh baru baik melalui aliansi ataupun karena modernisasi negaranya.⁵⁹ Artinya, AS akan melakukan perimbangan kekuatan karena merasa bahwa Tiongkok telah menggeser keuatannya di Arktik melalui modernisasi proyek PSR, yang juga memunculkan pembentukan kekuatan serta aliansi baru di kawasan Arktik. Di samping itu, hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa perimbangan kekuatan yang dilakukan AS terhadap Tiongkok tidak diimplementasikan secara ekstrem menggunakan eskalasi militer.

Jika dilihat dalam konteks militer, kekuatan militer AS sendiri sebenarnya masih tertinggal dari postur militer Rusia di Arktik.⁶⁰ AS juga memang kurang memperhatikan Arktik dalam dua dekade terakhir, dan pengaruh Tiongkok yang mulai memasuki Arktik melalui kebijakan PSR membuat AS semakin sulit untuk menghadapi persaingan di Arktik.⁶¹ Meskipun begitu, langkah strategis yang AS lakukan seperti memberikan donor dan memperkuat aliansi merupakan respons paling rasional yang dapat AS ambil berdasarkan teori *power transition*. *Power transition* menjelaskan keadaan ini sebagai situasi di mana negara hegemon, yaitu AS, menyadari bahwa negaranya memiliki kapabilitas minimum dan berpotensi untuk kalah, sehingga AS memilih untuk

⁵⁶ Ronald L. Tammen et al., *Power Transition Theory*, Oxford Bibliographies Online Datasets, 2012, <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0038>.

⁵⁷ Douglas Lemke, "The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War," *Journal of Peace Research* 34, no. 1 (1997): 23–36, <http://www.jstor.org/stable/424828>.

⁵⁸ TÜTER, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Waltz, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Burke, *Loc. Cit.*

⁶¹ Gronholt-Pedersen, *Loc. Cit.*

menghindari kemungkinan eskalasi militer dan melakukan penyesuaian secara damai, sehingga stabilitas Arktik terjaga.⁶²

Kesimpulan

Jawaban dari pertanyaan penelitian “**Bagaimana persepsi ancaman dan respons Amerika Serikat di Arktik terhadap Polar Silk Road?**” dijelaskan dalam tiga tahapan berdasarkan teori *power transition*, yaitu: (1) ancaman dan dilema keamanan; (2) perimbangan kekuatan; serta (3) perdamaian dan perang. Teori *power transition* menekankan eksistensi ancaman dari PSR Tiongkok yang kemudian menimbulkan dilema keamanan untuk AS. Bentuk ancaman yang AS dapatkan dari eksistensi PSR mengarah kepada dua hal, yaitu peningkatan rivalitas ekonomi AS-Tiongkok, dan kedekatan Tiongkok-Rusia di Arktik terkait militerisasi. Setelah itu, respons yang AS berikan di Arktik dijelaskan sebagai sebuah upaya perimbangan kekuatan. Penekanan teori *power transition* dalam konteks ini adalah bahwa implementasi perimbangan kekuatan AS dilakukan tidak dalam level ekstrem, dan dengan demikian Arktik tetap berada dalam keadaan damai. *Power transition* berargumen bahwa ketika negara hegemon dalam *status quo* melakukan perimbangan kekuatan secara ekstrem, seperti eskalasi militer, maka yang akan terjadi adalah perang.

Mengingat ancaman AS di Arktik mencakup kedua rival terbesarnya, yaitu Tiongkok bersama aliansinya, Rusia, kekuatan AS tidak cukup untuk menghadapi persaingan di Arktik. Maka, langkah paling strategis yang dapat AS lakukan menurut *power transition* adalah melalui penguatan aliansi dengan negara Arktik (Greenland dan negara anggota NATO) serta melakukan penyesuaian militer secara damai; tidak ekstrem. Dengan demikian, meskipun terdapat penelitian terdahulu yang berargumen bahwa eksistensi PSR Tiongkok dimaksudkan untuk objektif yang positif, AS tetap dapat mengalami dilema keamanan atas eksistensi PSR tersebut. Pemaparan analisis menggunakan teori *power transition* memperlihatkan bahwa rasa tidak aman dan tindakan AS di Arktik merupakan respons yang rasional, dengan penekanan argumen bahwa perimbangan kekuatan yang dilakukan AS harus tetap dalam tingkat rendah demi menjaga stabilitas di kawasan Arktik.

Daftar Pustaka

- A. F. K. Organski. (1968). *World Politics*. New York: Knopf.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What Is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. Springer. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Bedingfield, W. (2019, December 11). *As the Arctic melts, China and Russia struggle for control*. Wired UK. <https://www.wired.co.uk/article/arctic-ice-melting-shipping-russia-china>
- Biagioli, M. (2023). China’s Push-in Strategy in the Arctic and Its Impact on Regional Governance. *IAI Commentaries*, 23(41). <https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2341.pdf>
- Bonner, B. (2022, October 21). *Russia’s Arctic economy is heading for decline*. GIS Reports. <https://www.gisreportsonline.com/r/russia-arctic-economy/>
- Brown, R. (2022). China’s BRI on the Polar Silk Road: Evolving Labor Agenda in the Arctic. *Canada-United States Law Journal*, 46(1), 138–165. <https://scholarlycommons.law.case.edu/cuslj/vol46/iss1/13>

⁶² Organski, *Op. Cit.*, 372.

- Brzoska, M. (2012). Climate change and the military in China, Russia, the United Kingdom, and the United States. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 68(2), 43–54. <https://doi.org/10.1177/0096340212438384>
- Burke, R., & Matisek, J. F. (2021). The Polar Trap China, Russia, and American Power in the Arctic and Antarctica. *JOURNAL of INDO-PACIFIC AFFAIRS, Special Issue*, 36–66. <https://media.defense.gov/2021/Oct/24/2002879323/-1/-1/JIPA%20-%20BURKE%20&%20MATISEK.PDF>
- Cao, Y. (2022.). *Implications for Sino-Russian Cooperation on the Polar Silk Road*. Arctic Yearbook 2022. Retrieved February 17, 2024, from <https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2022/2022-scholarly-papers/425-implications-for-sino-russian-cooperation-on-the-polar-silk-road>
- Chen, C. (2023, April 4). *China-Russia Arctic Cooperation in the Context of a Divided Arctic*. The Arctic Institute - Center for Circumpolar Security Studies. <https://www.thearcticinstitute.org/china-russia-arctic-cooperation-context-divided-arctic>
- China-Russia 2023 trade value hits record high of \$240 bln - Chinese customs.* (2024, January 12). Reuters. <https://www.reuters.com/markets/china-russia-2023-trade-value-hits-record-high-240-bln-chinese-customs-2024-01-12/>
- Chou, B. (2024, June 25). *Implications of Russia and China's Developing Arctic Partnership*. American Security Project. <https://www.americansecurityproject.org/implications-of-russia-and-chinas-developing-arctic-partnership/>
- Franiok, N. (2020, April 22). *Russian Arctic Military Bases*. American Security Project. <https://www.americansecurityproject.org/russian-arctic-military-bases/>
- Freese, S. G., Elisabeth. (2018, May 1). *China's Ready to Cash In on a Melting Arctic*. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2018/05/01/chinas-ready-to-cash-in-on-a-melting-arctic/>
- Gladkiy, Y. N., Sukhorukov, V. D., Yu Kornekova, S., Kulik, S. V., & Kaledin, N. V. (2020). "Polar Silk Road": project implementation and geo-economic interests of Russia and China. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 434(1), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/434/1/012009>
- Gronholt-Pedersen, J., & Pamuk, H. (2020, April 23). *U.S. extends economic aid to Greenland to counter China, Russia in Arctic*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/uk-usa-trump-greenland-idUKKCN225202/>
- Hersman, R., Brewer, E., & Simon, M. (2021). *Strategic Stability and Competition in the Arctic*. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/resrep27652>
- Hong, N. (2022, October 20). *China and the United States in the Arctic*. ICAS. <https://chinaus-icas.org/research/china-and-the-united-states-in-the-arctic/>
- Irving, D. (2022, December 29). *What Does China's Arctic Presence Mean to the United States?* RAND. <https://www.rand.org/pubs/articles/2022/what-does-chinas-arctic-presence-mean-to-the-us.html>

Kenneth Neal Waltz. (1979). *Theory of International Politics*. Addison Wesley Publishing Company.

Lemke, D. (1997). The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War. *Journal of Peace Research*, 34(1), 23–36. <http://www.jstor.org/stable/424828>

Matti Puranen, & Sanna Kopra. (2023). China's Arctic Strategy – a Comprehensive Approach in Times of Great Power Rivalry. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 6(1), 239–253. <https://doi.org/10.31374/sjms.196>

Nilsson, A. E. (2018). The United States and the making of an Arctic nation. *Polar Record*, 54(2), 95–107. <https://doi.org/10.1017/s0032247418000219>

Nuroglu, E. (2021, October 2). *ANALYSIS - Great power rivalry heating up in Arctic circle*. [Www.aa.com.tr](http://www.aa.com.tr).
<https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-great-power-rivalry-heating-up-in-arctic-circle/2380185#>

Paul, M. (2023). U.S. Arctic Security Policy - North American Arctic Strategies, Russian Hubris and Chinese Ambitions. *Stiftung Wissenschaft Und Politik (SWP Comment)*, 40, 1–8. <https://doi.org/10.18449/2023C40>

Pincus, R. (2020). Three-Way Power Dynamics in the Arctic. *Strategic Studies Quarterly*, 14(1), 40–63. <https://www.jstor.org/stable/26891883>

Prokopenko, A. (2024, May 27). *What Are the Limits to Russia's "Yuanization"?* Carnegie Politika. <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/05/china-russia-yuan?lang=en>

Rosario, J. A. (2022). *U.S. ARMY ARCTIC DOMINANCE: A LONG WAY AWAY* (pp. 1–41). Maxwell Air Force Base: Air War College. https://aul.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=01AUL_INST:AU_L&docid=alma995924254906836

Security, S., & Order. (2021). *NORTHERN EXPEDITION CHINA'S ARCTIC ACTIVITIES AND AMBITIONS*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/04/FP_20210412_china_arctic.pdf

Sharma, A. (2021, October 25). China's Polar Silk Road: Implications for the Arctic Region. *Air University (AU)*. <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2820750/chinas-polar-silk-road-implications-for-the-arctic-region/>

Taherdoost, H. (2021). Data Collection Methods and Tools for Research; a Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 10(1), 10–38. <https://hal.science/hal-03741847/document>

Tammen, R. L., Kugler, J., Lemke, D., Tammen, R. L., Kugler, J., & Lemke, D. (2012). Power Transition Theory. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0038>

Tillman, H., Yang, J., & Nielsson, E. T. (2018). The Polar Silk Road: China's New Frontier of International Cooperation. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 04(03), 345–362. <https://doi.org/10.1142/s2377740018500215>

- Todd Lopez, C. (2024, July 22). *New DOD Strategy Calls for Enhancements, Engagements, Exercises in Arctic.* U.S. Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3846323/new-dod-strategy-calls-for-enhancements-engagements-exercises-in-arctic/>
- Townsend, J., & Kendall-Taylor, A. (2021). *Russian and Chinese Priorities in the Arctic and Prospects for Their Cooperation.* JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/resrep30199.6>
- TÜTER, M. (2022). China's Polar Silk Road: Opportunities and Challenges for Nordic Arctic. *International Journal of Politics and Security*, 04(03). <https://doi.org/10.53451/ijps.1152777>
- Wall, C., & Wegge, N. (2023, January 25). *The Russian Arctic Threat: Consequences of the Ukraine War.* [Www.csis.org.
https://www.csis.org/analysis/russian-arctic-threat-consequences-ukraine-war](https://www.csis.org/analysis/russian-arctic-threat-consequences-ukraine-war)
- Woon, C. Y. (2020). Framing the “Polar Silk Road” (冰上丝绸之路): Critical geopolitics, Chinese scholars and the (Re)Positionings of China’s Arctic interests. *Political Geography*, 78, 102–141. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102141>
- Xinmin, M. (2019). China’s Arctic policy on the basis of international law: Identification, goals, principles and positions. *Marine Policy*, 100, 271. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.027>